



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/079/B.07/HK/2024**

TENTANG

**PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, perlu menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 45 Tahun 2022 tentang Jabatan Pelaksana Pegawai Negeri di Lingkungan Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyusunan Kebutuhan Aparatur Sipil Negara;
11. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 79 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 9 Tahun 2024;
12. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 59 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 1 Tahun 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 2. Surat Pengantar Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor: 800.1.1.4/1326/V.07/B.V/2024, tanggal 10 Oktober 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN HASIL ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG.**

KESATU : Menetapkan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Jabatan Manajerial dan Jabatan Pelaksana pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, dan Lampiran III Keputusan ini.

KEDUA : Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu, menjadi pedoman untuk penataan dan penyempurnaan di bidang Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam rangka efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas.

KETIGA : Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor : G/557/B.07/HK/2022 tentang Penetapan Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 30-12-2024

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/879 /B.07/HK/2024
 TAHUN : 30 - 12 - 2024

REKAPITULASI ANALISIS BEBAN KERJA (ABK)

Unit Kerja : DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (EJ)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	KEPALA DINAS SOSIAL	1	1,488	1	0	A		
2	- SEKRETARIS	1	1,457	1	0	A	2,288	A
3	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2,499	2	(1)	A		
4	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,419	2	(2)	A		
5	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	3,825	4	(4)	A		
6	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,162	1	(1)	A		
7	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,497	2	(2)	A		
8	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
9	- KEPALA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	1	1,486	1	0	A		
10	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	3,248	3	(1)	A		
11	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
12	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
13	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	3	8,461	8	(5)	A		
14	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	1,424	1	(1)	A		
15	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	1,440	1	0	A		
16	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,288	1	(1)	A		
17	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,162	1	(1)	A		
18	- KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASSET	1	1,467	1	0	A		
19	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,849	2	(1)	A		
20	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,876	3	(3)	A		
21	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	1,832	2	0	A		
22	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
23	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,162	1	(1)	A		
24	- KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	1	1,328	1	0	A	3,031	A
25	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	4,547	5	(3)	A		
26	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
27	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	2	3,730	4	(2)	A		
28	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,440	1	(1)	A		
29	- KEPALA BIDANG REHABILITAS SOSIAL	1	1,314	1	0	A	2,713	A
30	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	4	6,447	6	(2)	A		
31	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIVITAS JABATAN (E-J)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
32	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
33	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,440	1	(1)	A		
34	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,441	1	(1)	A		
35	- KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN SOSIAL	1	1,490	1	0	A	2,547	A
36	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	5	6,296	6	(1)	A		
37	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
38	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
39	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	1,864	2	0	A		
40	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,440	1	(1)	A		
41	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,441	1	(1)	A		
42	- KEPALA BIDANG PENANGANAN FAKIR MISKIN	1	1,380	1	0	A	2,382	A
43	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	3,848	4	(3)	A		
44	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
45	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,832	2	(2)	A		
46	- PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	0	1,440	1	(1)	A		
47	- KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDA	1	1,304	1	0	A	1,740	A
48	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,071	1	0	A		
49	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2,449	2	(1)	A		
50	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
51	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
52	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	4,356	4	(3)	A		
53	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
54	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	1	2,362	2	(1)	A		
55	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,233	1	(1)	A		
56	- KEPALA SEKSI PELAYANAN	1	1,125	1	0	A		
57	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,299	1	0	A		
58	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
59	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,251	1	0	A		
60	- KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	1	1,125	1	0	A		
61	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
62	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
63	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,336	1	0	A		
64	- KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA RADIN INTAN	1	1,304	1	0	A	1,419	A
65	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	0	1,019	1	(1)	A		
66	- PENELAHAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2,449	2	(1)	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (E-J)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
67	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
68	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
69	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,832	2	(2)	A		
70	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
71	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	1,472	1	(1)	A		
72	- KEPALA SEKSI PELAYANAN	1	1,125	1	0	A		
73	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	2,449	2	0	A		
74	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
75	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,251	1	0	A		
76	- KEPALA SEKSI PENYALURAN	1	1,125	1	0	A		
77	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	2	2,449	2	0	A		
78	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
79	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
80	- KEPALA UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS	1	1,274	1	0	A	1,578	A
81	- KEPALA SUB BAGIANN TATA USAHA	1	1,019	1	0	A		
82	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	2,449	2	(1)	A		
83	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
84	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	2,407	2	(1)	A		
85	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
86	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
87	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2,362	2	0	A		
88	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	3,456	3	(3)	A		
89	- KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITAS	1	1,125	1	0	A		
90	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
91	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
92	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
93	- KEPALA SEKSI PENYALURAN	1	1,125	1	0	A		
94	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,299	1	0	A		
95	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	1	1,258	1	0	A		
96	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
97	- KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANK BUDI ASIH	1	1,304	1	0	A	1,372	A
98	- KEPALA SUB BAGIANN TATA USAHA	1	1,019	1	0	A		
99	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2,449	2	(2)	A		
100	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
101	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		

NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (E-J)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
102	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
103	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
104	- KEPALA SEKSI PELAYANAN	1	1,125	1	0	A		
105	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	1	1,299	1	0	A		
106	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
107	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
108	- KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	1	1,211	1	0	A		
109	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
110	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
111	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,251	1	0	A		
112	- KEPALA UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL MARDI GUNA	1	1,378	1	0	A	1,317	A
113	- KEPALA SUB BAGIANN TATA USAHA	1	1,019	1	0	A		
114	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2,449	2	(2)	A		
115	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
116	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
117	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
118	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
119	- PENATA LAYANAN OPERASIONAL	0	1,233	1	(1)	A		
120	- KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITAS SOSIAL	0	1,376	1	(1)	A		
121	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
122	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
123	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
124	- KEPALA SEKSI PENYALURAN	1	1,125	1	0	A		
125	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
126	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
127	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
128	- KEPALA UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA	1	1,304	1	0	A	1,377	A
129	- KEPALA SUB BAGIANN TATA USAHA	1	1,163	1	0	A		
130	- PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	0	2,449	2	(2)	A		
131	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
132	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
133	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
134	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
135	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	2	2,362	2	0	A		
136	- PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	0	0,768	1	(1)	C		

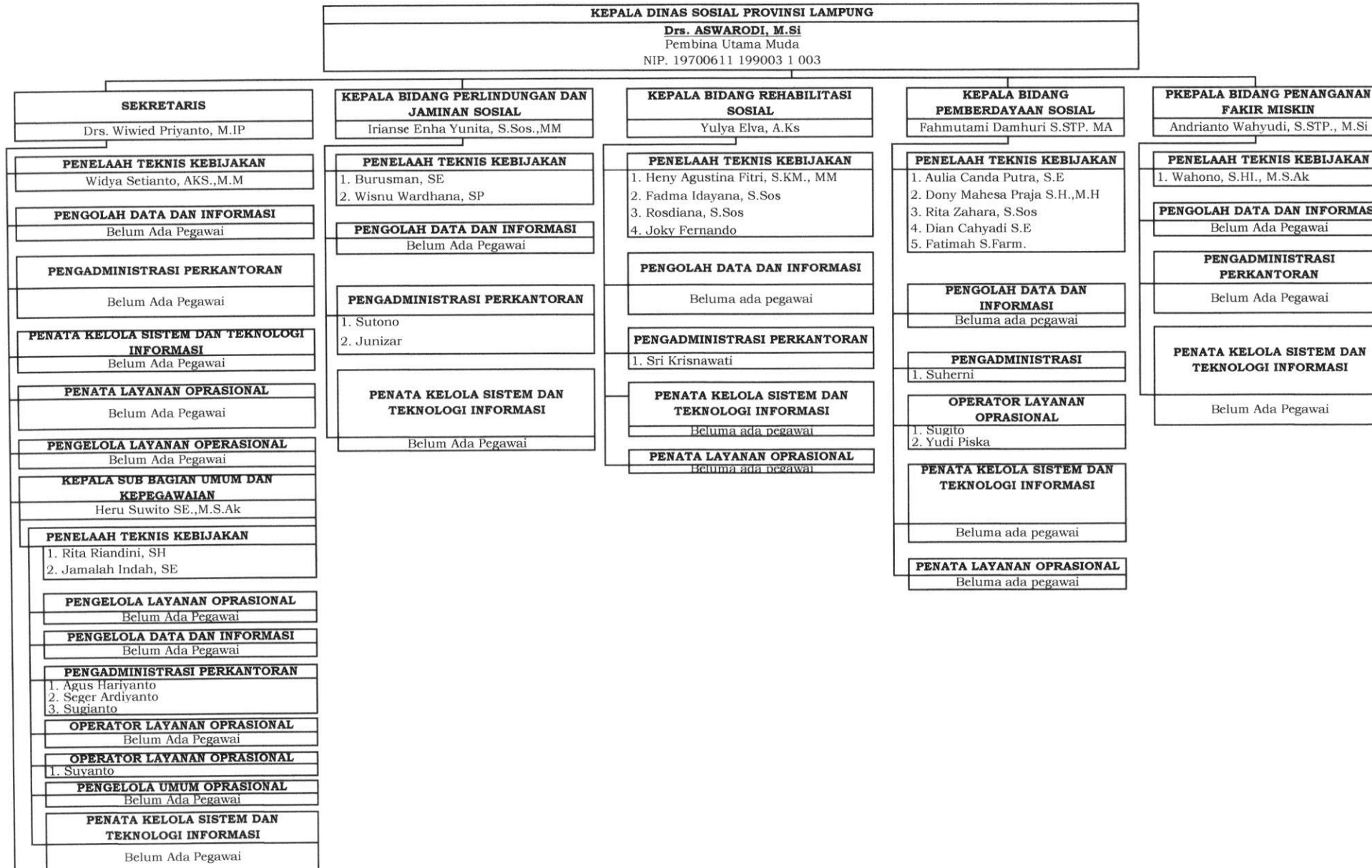
NO	NAMA JABATAN	JUMLAH PEMANGKU JABATAN	NILAI BEBAN KERJA/EFEKTIFITAS JABATAN (E-J)	HASIL ABK	KELEBIHAN/KEKURANGAN	PJ	Efektifitas Unit (EU)	PU
1	2	3	4	5	6	7	8	9
137	- KEPALA SEKSI PELAYANAN	0	1,125	1	(1)	A		
138	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
139	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
140	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,251	1	0	A		
141	- KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	1	1,347	1	0	A		
142	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
143	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
144	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
145	- KEPALA UPTD PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA	1	1,352	1	0	A	1,309	A
146	- KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA	1	1,019	1	0	A		
147	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	2,449	2	(2)	A		
148	- PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	0	2,320	2	(2)	A		
149	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	2,407	2	(2)	A		
150	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	1	1,832	2	(1)	A		
151	- OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	0	2,362	2	(2)	A		
152	- KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL	0	1,125	1	(1)	A		
153	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
154	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
155	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
156	- KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN LANJUT	1	1,125	1	0	A		
157	- PENELAHAH TEKNIK KEBIJAKAN	0	1,299	1	(1)	A		
158	- PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	0	1,358	1	(1)	A		
159	- PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	0	1,251	1	(1)	A		
JUMLAH		88	295,636	254	-166		1,848	A

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

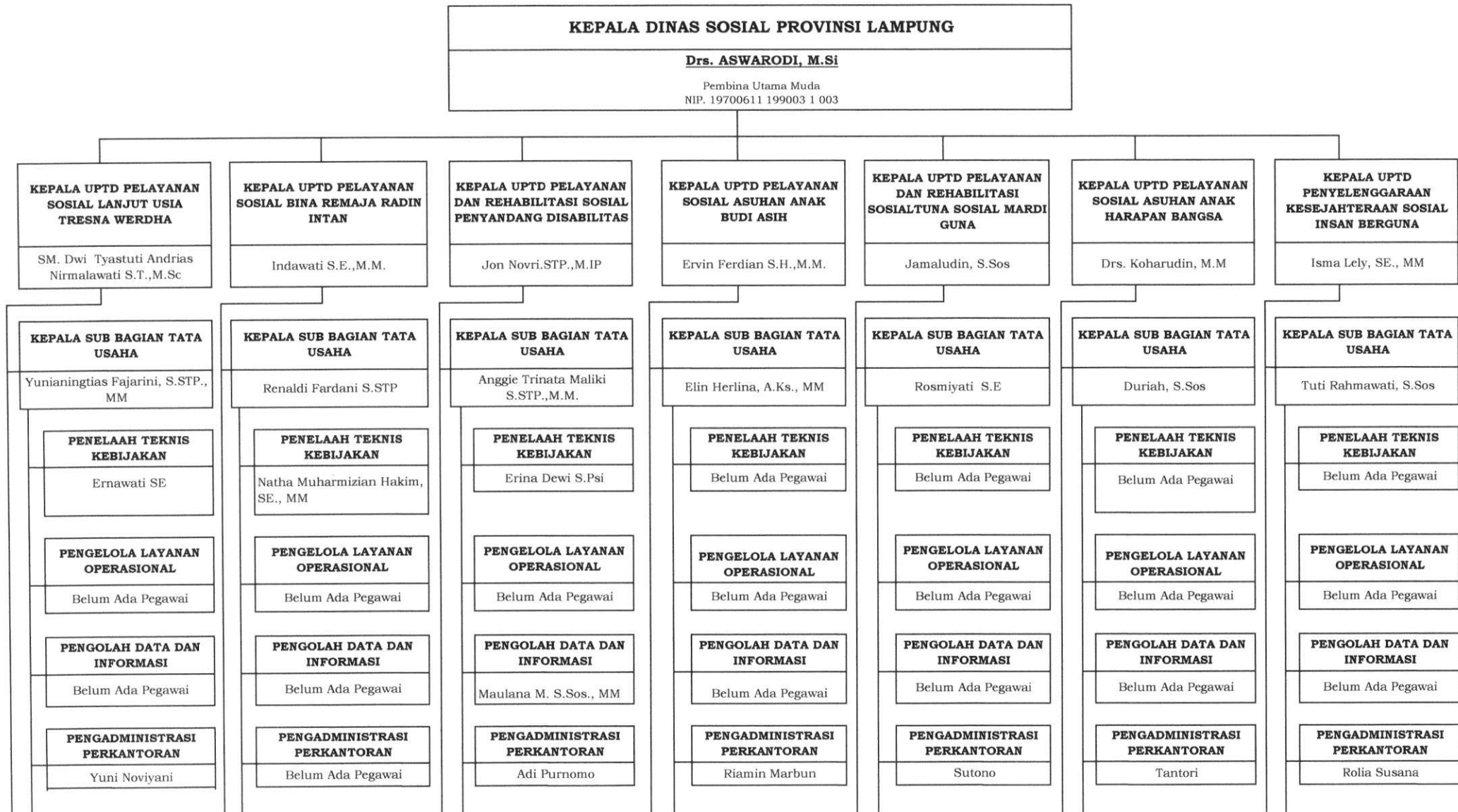
**2.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN
 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**



KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET
Ahmad Farid Febrian, SH., MH
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Erlinawati, S.Sos
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
1. Mahsun Harris 2. Triyoga Permana Putra
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI
Belum Ada Pegawai

2.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN

**UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDA, UPTD PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA RADEN INTAN, UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL PENYANDANG DISABILITAS, UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN BUDI ASIH, UPTD PELAYANAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL MARDI GUNA, UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA, UPTD PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**



OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL
Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KEPALA SEKSI PELAYANAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	OPERATOR LAYANAN OPERASIONAL	KEPALA SEKSI REHABILITASI SOSIAL
Parmiah	Belum Ada Pegawai	1. Suyono 2. Rubiyati	Hodijah, SH	Benny Andhika, S.H.,M.H	1. Rasikun 2. Nahrullah	Belum Ada Pegawai
PENATA LAYANAN OPERASIONAL	KEPALA SEKSI PELAYANAN	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGELOLA UMUM OPERASIONAL	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Belum Ada Pegawai	Asmanah, SH., MH	Belum Ada Pegawai	Anggi Cynthia Dewi SH.,MH	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
KEPALA SEKSI PELAYANAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	KEPALA SEKSI PELAYANAN DAN REHABILITASI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI PELAYANAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Sukam Satun S.E.,M.M	1. Agung Wijaya, S.I.Kom 2. Auliana Eka Dewi S.Sos.,M.M	Emir Santho, SH., MM	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Yurni, S.Psi	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	KEPALA SEKSI PENYALURAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI PEMANTAUAN DAN PEMBINAAN LANJUT
Belum Ada Pegawai	Usman	Belum Ada Pegawai	Deswita Rais, A.Ks	Purnama Simbolon, SE	Belum Ada Pegawai	Arief Rakhman Jacob S.E.,M.M
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	KEPALA SEKSI PENYALURAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN
Ferika Tjiptosari	Elsirita S.Sos., M.M.	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai
KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	KEPALA SEKSI PENYALURAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	KEPALA SEKSI PENYANTUNAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Yuanita Damayanti, S.Sos	1. Winda Maulina Pasaribu S 2. Farah Fardeya S.T.	Dewi Hendriyani, SE., MM	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Nadia Chintami, SE., MM	Belum Ada Pegawai
PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	PENELAAH TEKNIS KEBIJAKAN	PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Rusman, A.Ks	Rosidi	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai	Belum Ada Pegawai

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Deni Hendra, SP

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai

PENGOLAH DATA DAN INFORMASI
Belum Ada Pegawai

PENGADMINISTRASI PERKANTORAN
Belum Ada Pegawai

Pj. GUBERNUR LAMPUNG,



SAMSUDIN

**3.1 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA
 DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG**

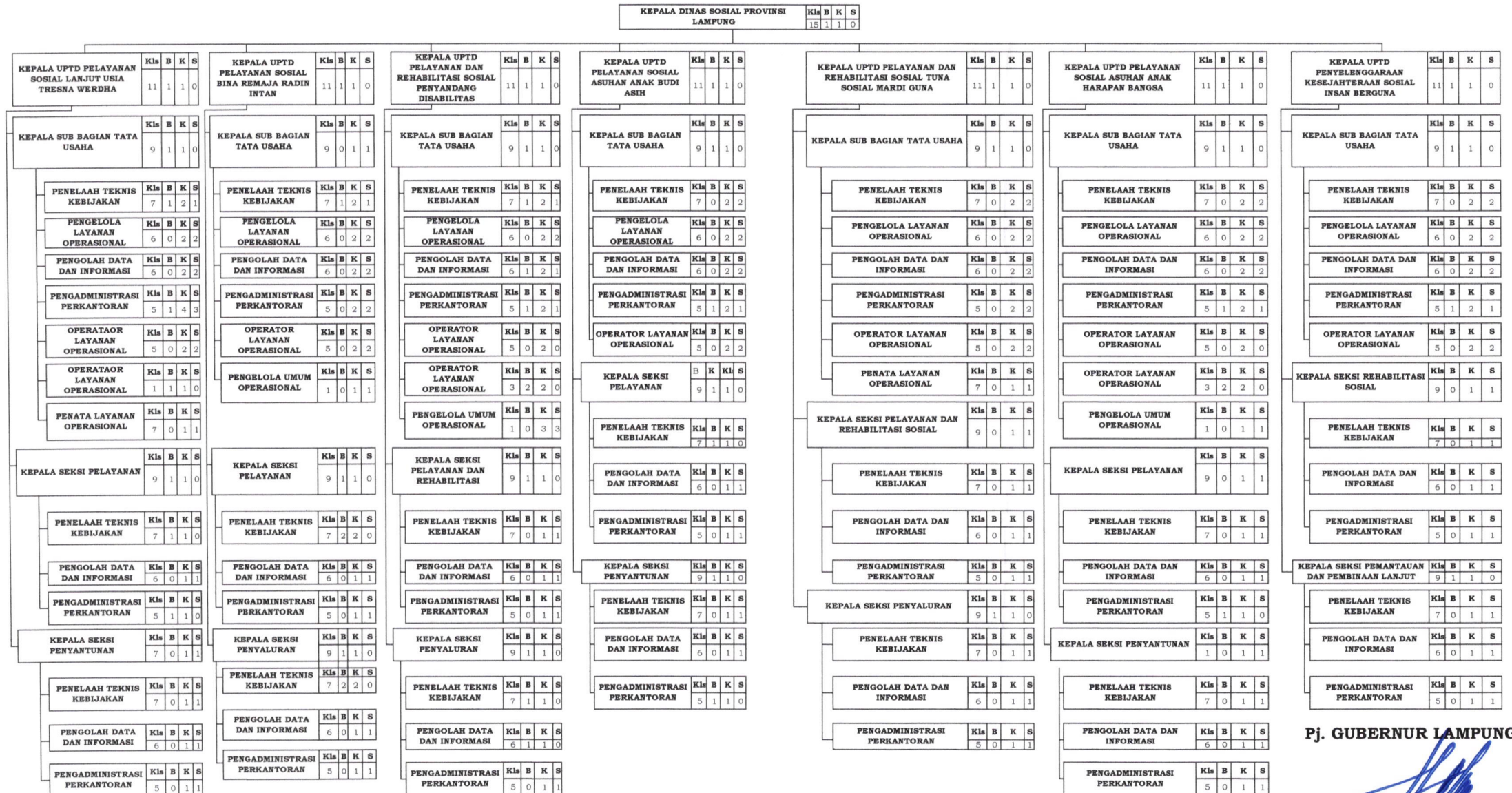
KELAS JABATAN	B	K	S
KELAS 15	1	1	0
KELAS 12	1	1	0
KELAS 11	12	12	0
KELAS 9	20	23	3
KELAS 7	27	70	43
KELAS 6	2	63	61
KELAS 5	19	72	53
KELAS 3	5	5	0
KELAS 1	1	7	6
JUMLAH	88	254	166

KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG	Kls	B	K	S
	15	1	1	0



SUB BAGIAN KEUANGAN DAN ASET	Kls	B	K	S
	9	1	1	0
PENELAAH TEKNIKIS KEBIJAKAN	Kls	B	K	S
	7	1	2	1
PENGOLAH DATA DAN INFORMASI	Kls	B	K	S
	6	0	3	3
PENGADMINISTRASI PERKANTORAN	Kls	B	K	S
	5	2	2	0
PENGELOLA LAYANAN OPERASIONAL	Kls	B	K	S
	6	0	2	2
PENATA KELOLA SISTEM DAN TEKNOLOGI INFORMASI	Kls	B	K	S
	7	0	1	1

3.2 PETA JABATAN MANAJERIAL DAN JABATAN PELAKSANA HASIL PENYUSUNAN ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG
UPTD PELAYANAN SOSIAL LANJUT USIA TRESNA WERDA, UPTD PELAYANAN SOSIAL BINA REMAJA RADIN INTAN, UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL
PENYANDANG DISABILITAS, UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK BUDI ASIH, UPTD PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL TUNA SOSIAL MARDI GUNA,
UPTD PELAYANAN SOSIAL ASUHAN ANAK HARAPAN BANGSA, UPTD PENYELENGGARAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL INSAN BERGUNA
DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG



Pj. GUBERNUR LAMPUNG

SAMSUDIN